

PPPKI dan GAPI: Dua Konsentrasi Nasional di Antara Dua Perang Dunia

Pendahuluan

Munculnya nasionalisme sebagai antitesis terhadap kolonialisme sebagai suatu kesadaran dari golongan intelektual pada awal abad ke-20 merupakan suatu jawaban atas berbagai '*policy*' penjajahan yang dijalankan pada masa itu. Walaupun pada mulanya teraktualisasi melalui gerakan nasionalis yang terkotak-kotak baik dilihat dari segi etnik, agama, maupun kepentingan kelompoknya. Kenyataan terlihat bahwa ketika benih-benih nasionalisme itu timbul melalui Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan lain-lain pada mulanya tidak bisa lepas dari latar belakang pendiriannya masing-masing.

Akan tetapi, kenyataan di atas lambat laun mulai ditata kembali ketika muncul suatu tuntutan menuju suatu konsentrasi dalam berbagai bentuk. Hal ini lebih jelas lagi dalam periode 1920-an, berbagai organisasi pergerakan mencoba menghimpun kekuatan melalui Permufakatan Partai-partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), 1927, misalnya. Namun demikian, konsentrasi ini mendapat ujian yang berat manakala kekuatan di dalamnya terpecah, sehingga prinsip nasionalisme, kemerdekaan, kesatuan, dan kesamaan (Katrodirdjo, 1990) tidak bisa dipertahankan lagi.

Pada periode 1930-an timbul kembali upaya kaum pergerakan dalam menyusun barisan persatuan. Salah satu contoh yang menonjol adalah Gabungan Politik Indonesia (GAPI), 1937. Aktivitas konsentrasi nasional ini tentu merupakan satu ganjalan bagi pemerintah kolonial yang dalam keadaan terancam di bawah bayang-bayang perang dunia II. Jika dilihat dari usia pergerakan nasional, hal ini sesungguhnya telah memasuki kematangan politik. Akan tetapi, politik *divide et impera* yang dilakukan penjajah telah mengubah kondisi konsentrasi nasional.

Dari berbagai aktivitas kaum pergerakan nasional, meminjam istilah Helius Sjamsuddin (1994), dapat ditarik suatu generalisasi yang terbentuk menjadi *trend* atau *pattern*: tarik ulur daya sentripetal dan sentrifugal yang diwujudkan dalam proses integrasi dan disintegrasi dari masa ke masa. Kedua tenaga yang timbul itu bisa dari dalam maupun dari luar, namun demikian, silih bergantinya kedua tenaga sentripetal dan sentrifugal itu bermuara pada integrasi.

Fluktuasi intergrasi dan disintegrasi pada pergerakan nasional yang ditampilkan melalui konsentrasi nasional di sini adalah PPPKI dan GAPI. Pemilihan kedua konsentrasi tersebut didasarkan kepada karakteristik keduanya. Meskipun pembentukan keduanya berada pada kurun antara Perang Dunia I dan II, akan tetapi akan terlihat kesamaan dan perbedaannya. Pemerintah kolonial mencoba mengekang dan memecah belah keduanya pada satu sisi. Pada sisi lain, pemerintah kolonial melakukan kebijakan untuk menghindari kesukaran dan kecerobohan (Schrieke, 1929) itu berlaku bagi peristiwa-peristiwa yang timbul akibat adanya kemajuan yang pesat.

Melalui PPPKI dan GAPI, penulis mencoba melakukan komparasi dari keduanya, dengan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, PPPKI dan GAPI merupakan organisasi yang terbentuk pada dekade 1920-an dan 1930-an. Adakah hal yang menjadi karakteristik keduanya? Kedua, apakah konflik-konflik yang terjadi pada kedua konsentrasi itu dapat mengubah arah pergerakan? Dan terakhir, merupakan suatu refleksi bagi para elit politik masa kini dalam menghadapi konflik antarelit

tanpa mengesampingkan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pergerakan Nasional Pada Dekade 1920-an

Pada dekade 1920-an kondisi pergerakan nasional telah mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan tersebut, bukan saja karena usia pergerakan nasional telah belasan tahun, akan tetapi bidang-bidang yang dimasuki oleh kaum pergerakan sudah menekuni bidang-bidang politik yang pada periode sebelum Perang Dunia I tidak banyak dibicarakan, atau lebih tepat dikatakan belum menjadi perhatian utama, kecuali bagi Indische Partij yang sejak awal berdirinya telah cenderung ke arah politik. Sedangkan bagi Boedi Oetomo (BO) dan Sarekat Islam (SI) pada masa pembentukannya belum menyentuh program politik. Sebab-sebab khusus dari pembentukan kedua organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang belum memungkinkan melakukan pembicaraan-pembicaraan politik. Baik BO maupun SI memang orientasinya masih di luar lapangan politik.

Jika membandingkan BO dan SI secara khusus keduanya dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berbeda. Yang pertama dilatarbelakangi oleh mendesaknya bidang pendidikan, sedangkan bagi yang kedua, faktor ekonomi pada mulanya sangat dominan. Oleh karena itu, BO orientasinya ke bidang sosial budaya dengan tujuan “kemajuan yang harmonis buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dan dagang, teknik, industri, kebudayaan” (Pringgogidgo, 1980: 1). Sedangkan SI memiliki tujuan “mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong menolong (Pringgogidgo, 1980: 5).

Walaupun keduanya berangkat dari adanya perbedaan-perbedaan, akan tetapi peristiwa Perang Dunia I telah mengubah haluan keduanya. *Indie Weerbaar* yang membawa dampak politik bagi kaum pergerakan, yaitu dibentuknya Volksraad merupakan contoh adanya perubahan garis kebijakan organisasi. Di samping itu, BO, SI, Insulinde, dan ISDV mendirikan *Radicale Concentratie* dalam Volksraad yang menuntut dibentuknya Majelis Nasional sebagai “parlemen pendahuluan” untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara.

Radicale Concentratie ini pada hakekatnya merupakan konsentrasi yang pertama pada masa pergerakan nasional. Meskipun anggota-anggotanya terbatas pada beberapa organisasi, akan tetapi konsentrasi tersebut telah melakukan hal-hal yang terbaik khususnya bagi kaum pergerakan, dan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Tambahan pula, badan tersebut merupakan cikal bakal bagi berdirinya konsentrasi nasional pada dekade berikutnya.

Beberapa kejadian penting yang melatarbelakangi pendirian konsentrasi nasional adalah apa yang dikatakan Kartodirdjo (1990) sebagai radikalisme pergerakan nasional. Radikalisme ini oleh Pringgogidgo (1980: 25), terlihat pertama kali ketika pada tanggal 23 Mei 1920 berdiri Partai Komunis Indonesia (PKI). Pendirian PKI sendiri sesungguhnya banyak didukung oleh Komunistische Internationale pasca Revolusi Rusia. Oleh karena itu, sesuai dengan sikap dan aksi gerakannya, PKI dengan orang-orangnya yang mantan anggota SI yang dipecat karena berlakunya disiplin partai, dalam gerakan radikalismenya bukan cuma ditujukan kepada pemerintah kolonial, akan tetapi juga ditujukan kepada organisasi lain. Pada kongres istimewa, 24 Desember 1920, Semaun sebagai pemimpin PKI menuduh SI sebagai pergerakan rakyat yang menyokong kapitalisme (Pringgogidgo, 1980: 26).

Aksi-aksi PKI itu mencapai puncaknya pada tahun 1926 dengan melakukan pemberontakan. Pringgodigdo (Pringgodigdo, 1980: 32) menulis, kaum komunis melakukan pemberontakan di Jakarta dan Tangerang (12 – 14 November 1926), di Banten (12 November – 5 Desember 1926), di Priangan (12 – 16 November 1926), di Solo (17 – 23 November 1926), di Kediri (12 November – 15 Desember 1926), dan baru pada tahap rencana untuk daerah-daerah Banyumas, Pekalongan, dan Kedu. Sedangkan di Sumatra pemberontakan ini biasa disebut Pemberontakan Silungkang, Januari 1927 (Dimjati, 1951: 23).

Meskipun pemberontakan itu gagal, akan tetapi dampaknya sangat besar, yang kena hukuman pembuangan ke Digul misalnya, bukan hanya orang-orang PKI, melainkan banyak anggota pergerakan yang bukan PKI kena getahnya. Akibat pemberontakan itu pula PKI beserta onderbouwnya dilarang Pemerintah Kolonial. Bagi PKI sendiri, tidak ada kata menyesal atas kegagalan itu; tidak ada korban yang percuma (Dimjati, 1951: 25).

Terlepas dari aktivitas yang dilakukan PKI, Pemerintah Kolonial melakukan berbagai tindakan yang reaksioner. Sebagaimana dikatakan di atas, banyak orang yang bukan komunispun ditangkap dan dibuang. Hal ini berarti ada jalan bagi Pemerintah Kolonial untuk bertindak semena-mena terhadap kaum pergerakan. Dalam artian, bahwa Pemerintah Kolonial mencari-cari kesalahan siapa saja yang menentang kebijakannya.

Sementara itu, hal yang tidak bisa dikesampingkan juga dalam periode ini adalah kebijakan Gubernur Jendral (GJ) yang memerintah selama dawasra ini. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kebijakan GJ dan terutama mengenai sikapnya terhadap kaum pergerakan akan memperjelas kondisi pergerakan nasional selama tahun-tahun 1920-an.

Sepeninggal GJ Van Limburg Stirum (1916 – 1921) yang terkenal dengan November *belofte*-nya, Hindia Belanda diperintah oleh GJ Mr. Dirk Fock (1921 – 1926). GJ yang baru ini sengaja didatangkan ke Batavia dalam rangka mengatasi masalah keuangan dan politik. Dalam bidang keuangan, GJ Van Limburg Stirum dianggap sebagai GJ yang gagal karena borosnya pengeluaran uang. Karena keborosannya, pada akhir jabatannya dalam keadaan yang rugi, sehingga harus menutupi kekurangan itu dengan sejumlah uang yang tidak sedikit (Koch, 1951: 93 – 94). Namun demikian, keadaan yang demikian itu juga tidak sepenuhnya merupakan kesalahan sendiri, melainkan kebijakan atasannya, Menteri Simon de Graaf yang tidak menggubris rencana Van Limburg Stirum untuk melakukan perubahan dalam pengaturan pemungutan pajak. Adapun usul dari Van Limburg Stirum itu baru dilaksanakan oleh de Graaf setelah Van Limburg Stirum habis masa jabatannya.

Keadaan keuangan ini nyata sekali sangat menguntungkan Dirk Fock. Berdasarkan komisi penyelidikan mengenai tekanan atas pajak terhadap rakyat Jawa dan Madura, maka sejak tahun 1922 pemerintah telah mendapat keuntungan yang besar. Komisi yang diketuai oleh Meyner Ranneft-Huender (Koch, 1951: 94 – 97) melaporkan bahwa, pajak yang dipungut dari rakyat dalam tahun 1919 – 1920 hanya sebesar f 23,5 – f 24 juta. Sedangkan tahun 1922 naik menjadi f 28,1 juta; tahun 1923 mencapai f 31,7 juta dan tahun 1924 memperoleh f 32,8 juta. Angka-angka di atas merupakan jumlah yang besar karena memang di balik penderitaan rakyat itu, pemerintah memungut pajak rata-rata 4% dari penghasilan untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan sampai 5% atau rata-rata 10% untuk Pulau Jawa dan Madura. Di samping intensifikasi pajak, keuntungan yang diperoleh

pemerintah menunjukkan angka kenaikan, yaitu dari f 38,8 juta pada tahun 1919 menjadi f 59,3 juta pada tahun 1924. Bahkan, keuntungan dari minyak, kayu api, dan tembakau kenaikannya mendekati 100%, yaitu sebanyak f 13,3 juta pada tahun 1919, sedangkan pada tahun 1924 keuntungan mencapai 24,9 juta.

Selanjutnya, Komisi Meyer Ranneft itu melaporkan bahwa, kenaikan finansial yang diperoleh itu tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sungguh ironis sekali, ketika rakyat sedang tertindas oleh beratnya berbagai kewajiban, termasuk pajak, pemerintah malah ingin segera menutupi anggaran. Akibatnya, semakin lebarlah *gap* antara Nederland dan Hindia Belanda. Seorang anggota Volksraad, Wessing, dalam sidang tahun 1926 menggambarkan kondisi keuangan Hindia Belanda bahwa, jika dipandang dari kas negara, boleh dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan hal yang semestinya. Akan tetapi, janganlah lupa bahwa, keuntungan yang diperoleh dengan menjerumuskan rakyat ke limbah kemiskinan (Koch, 1951: 94 – 97).

Dari laporan di atas, jelas sekali bahwa, kebijakan GJ Dirk Fock itu benar-benar telah membawa kesengsaraan bagi rakyat. Hal itu dilakukan juga pada bidang politik. Dalam bidang tersebut, dia terkenal sebagai seorang yang bertangan besi. Meskipun pada mulanya ia menamakan seorang *etisch*, akan tetapi pada kenyataannya bertolak belakang dengan idealismenya. Sebagai contoh dapat dikatakan kritiknya terhadap GJ Van Limburg Stirum bahwa, segala kekacauan dan kegelisahan yang terjadi di Hindia Belanda adalah karena ucapan pemerintah yang tidak masuk akal. Pernyataan Van Limburg Stirum yang menjanjikan perubahan dalam struktur Volksraad pada tanggal 18 November 1918 – *November belofte* dikritik Dirk Fock sebagai telah membangkitkan semangat rakyat untuk memberontak. Ucapannya itu dilaksanakan secara nyata pada masa pemerintahannya dengan membungkan berbagai gejolak: pemogokan-pemogokan buruh buruh antara tahun 1922 dan 1923, baik di pegadaian maupun pegawai kereta api segera ditumpasnya. Demikian pula pada tahun 1925 terhadap pemogokan pegawai pabrik mesin kapal di Surabaya. Akibatnya, Dirk Fock mengeluarkan intruksi kepada setiap residen yang disebut “mandate blanko” yang tujuannya boleh melakukan tindakan seperlunya tanpa harus menunggu perintah GJ. Gambaran di atas menunjukkan bahwa Dirk Fork sebagai GJ yang reaksioner terhadap kaum pergerakan nasional dan kemajuan rakyat Hindia Belanda.

Sementara itu, pengganti Dirk Fock adalah Mr. Andries Cornelis Dirk de Graeff, seorang GJ bangsawan yang berperasaan halus. Oleh karena itu, kebijakannya diharapkan tidak seperti pendahulunya, demi menarik simpati rakyat Hindia Belanda. Seperti yang dijelaskan di atas, Dirk Fock telah banyak mengorbankan rakyat. Sebaliknya, de Graeff berpendirian bahwa, dia akan memperkenankan kehendak kaum nasionalis asal tidak membahayakan Nederland.

Akan tetapi, ketika baru beberapa bulan bertugas, dan terjadi pemberontakan yang dilakukan PKI, maka de Graeff segera mengambil tindakan yang bertentangan dengan pendiriannya semula. Bahkan, sesungguhnya dialah yang menciptakan pembuangan Digul, di samping menghukum mati beberapa pemberontak (Koch, 1951: 117). Kejadian ini merupakan suatu pertanda bahwa, idealisme setinggi apapun untuk memajukan rakyat Hindia Belanda, khususnya kaum pergerakan nasional, tidak pernah terjadi karena semua GJ mempunyai tugas yang sama, yaitu memomorsatukan kepentingan Kerajaan Belanda. Konsekuensinya adalah setiap pergerakan yang ada, yang sudah tentu membahayakan pemerintah kolonial, akan ditumpas. Kebijakan lain yang

sangat nyata adalah penangkapan terhadap para pimpinan PNI, Ir. Soekarno dan kawan-kawan yang dianggap sebagai orang-orang radikal.

Walaupun demikian, pada dasawarsa 1920-an ini ada beberapa kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehendak untuk bersatu di kalangan kaum pergerakan muncul pada bulan September 1926 melalui Komite Persatuan Indonesia, yang di dalamnya bergabung *studieclub-studieclub*, SI, Muhammadiyah, JIB, Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Tantangan yang datang dari pemerintah kolonial yang reaksioner merobek-robek persatuan Indonesia dijawab dengan munculnya konsentrasi nasional pada pertengahan Desember 1927, Permusyawaratan Perhimpunan Partij-partij Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang dipelopori oleh PNI. Di samping itu kalangan pemuda menyelenggarakan kongres tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, juga pada tanggal 27 Januari 1930, Moh. Husni Thamrin dalam *Vlksraad* mendirikan Fraksi Nasional. Kesemuanya itu merupakan upaya kaum nasionalis dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial. Kondisi ini, sudah barang tentu, menjadi presiden bagi periode 1930-an.

Pergerakan Nasional Pada Dekade 1930-an

Pada tahun-tahun dekade 1920-an dan awal 1930-an situasi ekonomi dunia mengalami malaisme. Hal ini akan semakin menguatnya pemerasan yang dilakukan penjajah untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan penjajah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian pula dalam bidang politik, aktivitas kaum nasionalis semakin dipersempit gerakannya. Hal ini terbukti seperti yang dilakukan terhadap para pemimpin PNI.

Ketika Raad Van Justitie menyatakan bahwa para aktivis PNI bersalah, maka pada tanggal 17 April 1931 *Ladraad Bandung* menghukum Ir. Soekarno 4 tahun penjara; maskun 2 tahun; supriadinata 1 tahun 8 bulan; dan Gatot mangkupradja 1 tahun 3 bulan. Hal ini merupakan keingkaran de Graeff yang pernah berjanji akan menjamin kelangsungan pergerakan nasional "asal jangan komunis". Sementara Ir. Soekarno cs dipenjarakan, bagi kaum nasionalis, tidak ada pilihan lain, kecuali berupaya untuk membentuk partai baru. Alasan inilah yang dipegang oleh Mr. Sartono, mantan pengurus PNI, untuk mendirikan Partai Indonesia (Partindo) pada tanggal 30 Mei 1931 (Pringgodigdo, 1980: 114).

Parati yang bertujuan indonesia merdeka ini, baik asas maupun aksi-aksinya tidaklah berbeda dengan PNI. Oleh karena itu, segera mendapat tanggapan dari rakyat Hindia Belanda yang mengharapkan adanya partai yang revolusioner. Tambahan pula, ketika Ir. Soekarno dibebaskan pada pertengahan tahun 1932, beberapa bulan kemudian menjadi ketua partai ini. Akan tetapi, pada awal 1934 Ir. Soekarno kembali ditangkap dan dibuang ke Flores. Karena penangkapan terhadap para aktivis tersebut, Partindo dibubarkan pada bulan November 1936. Lima bulan kemudian, tepatnya tanggal 24 mei 1937, mantan anggota Partindo mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).

Sementara itu, orang-orang yang tidak sependapat dengan Mr. Sartono merasa kecewa terhadap tindakannya. Oleh karena itu, mereka menamakan diri sebagai "golongan merdeka", terlepas dari tindakan Mr. Sartono. Maka, pada akhir Desember 1933, atas Indonesia (PNI-Baru) yang berasaskan *non-cooperatie*, *zelfhelp*, dan *kadervorming*. Para pemimpin PNI-Baru ini adalah

Sutan Sjahrir, kemudian Drs. Moh. Hatta kembalinya dari Nederland. Akan tetapi, karena aksinya yang dinilai sangat membahayakan pemerintah kolonial, maka para pemimpin partai ini pun ditangkap, Drs. Moh. Hatta sendiri diasingkan ke Digul.

Kedua partai yang dikemukakan di atas adalah partai-partai yang melakukan prinsip nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial. Sedangkan partai-partai yang melakukan kooperatif misalnya Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang merupakan kelanjutan dari Indonesische Studieclub yang didirikan oleh Dr. Soetomo. Walaupun demikian, haluan kooperasi bagi PBI merupakan taktik saja. Demi memperkuat ketahanan organisasi, PBI dan BO melakukan fusi pada tahun 1935 dengan nama Partai Indonesia Raya (Prarindra).

Sebagaimana pada dasawarsa sebelumnya, kondisi pergerakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang reaksioner dari GJ De Jonge, 1931 – 1936. Bahkan, pergerakan politik bagi GJ tersebut merupakan masalah polisi. Oleh karena itu, Koch (1951: 152) menyebutnya sebagai GJ yang reaksioner, kejam, dan bodoh. Kebijakan yang dilaksanakannya, disamping mengasingkan kaum nasionalis, juga tidak memberi peluang kepada gerakan-gerakan yang revolusioner. Kondisi masyarakat yang “diam” pada masa akhir pemerintahannya bukan karena rakyat merasa sejahtera, melainkan karena tangan besi De Jonge.

Kecuali Parindra, partai-partai politik pada masa itu sudah tidak menampilkan aslinya. Tambahan pula, perpecahan yang terjadi pada PSII serta *divide et impera* yang dilakukan pemerintah terhadap Gerindo dan Parpindo, merupakan contoh yang melemahkan pergerakan nasional. Pergantian GJ sekalipun tidak mengubah kondisi pergerakan. GJ yang baru, Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer, dinilai Koch sebagai GJ yang baik, ternyata harus taat kepada penasehatnya di Nederland. Dengan demikian, karena kondisi waktu itu, roda pemerintahan lebih banyak dikemudikan dari Nederland.

Karena kebijakan penguasa di Nederland pula, akhir dekade 1930-an merupakan lembaran baru bagi kaum nasionalis. Setelah para nonkooperator dibuang, para tokoh pergerakan mulai memanfaatkan Volksraad sebagai arena perjuangan. Di samping Husni Thamrin yang sejak semula bergerak di Volksraad, terdapat juga Soetardjo dan Wiwoho yang mencoba mengajukan petisi dan mosi untuk menentukan status Indonesia walaupun perjuangan mereka kandas. Bahkan aksi Indonesia Berparlemen yang diperjuangkan GAPI, tidak pernah mendapat respons positif dari pemerintah kolonial di Nederland.

Ketika di Indonesia timbul berbagai tuntutan kaum pergerakan nasional, pada bulan November 1940, yang berarti Perang Dunia II. Peristiwa ini juga tidak merupakan peringatan bagi Nederland, sebaliknya pecahnya PD II tersebut merupakan alasan bagi Nederland untuk tidak mengubah kebijakannya di Indonesia. Dengan alasan itu pula pemerintah Belanda yang melakukan *exile government* di London membujuk Bangsa Indonesia agar sabar, segala sesuatunya akan dibicarakan setelah perang berakhir.

Sebagai langkah untuk meredakan tuntutan kaum pergerakan nasional, pada bulan November 1940 dibentuklah Komisi untuk mempelajari perubahan tata negara yang diketuai oleh F.H. Visman. Komisi Visman ini pun sesungguhnya hanya merupakan strategi Nederland yang berada dalam kancah PD II. Dengan iming-iming perubahan Indonesia pasca PD II, Nederland pun menuntut

kembali Milisi Bumiputera, sebagaimana yang telah dilakukannya ketika PD I berkecamuk. Demikianlah janji-janji Pemerintah Hindia Belanda itu terkubur ketika pada tanggal 8 Maret 1942 harus menyerah kepada tentara Jepang. Namun demikian, dua dasawarsa terakhir dari penjajahan Belanda itu telah memberi warna atau pola; PPPKI pada dekade 1920-an dan GAPI pada dekade 1930-an.

Pembentukan PPPKI

Sebagaimana dijelaskan pada bab yang lalu, bahwa pergerakan nasional pada dekade 1920-an ditandai, antara lain, dengan adanya persaingan di antara kaum pergerakan nasional sendiri dan penempatan gubernur jenderal yang reaksioner. Namun demikian, dalam situasi seperti itu kaum nasionalis terus berupaya untuk terus mempertahankan keberadaannya, bahkan meningkatkan perjuangannya.

Atas dasar itulah, maka kaum nasionalis mencoba menyatukan persepsi: bersatu untuk melawan penjajah, menuju kemerdekaan. Satu hal yang perlu diperhatikan dari kondisi kaum pergerakan nasional adalah sifatnya pluralistik. Sifat ini kemudian menjadi karakteristik pergerakan pada dekade ini. Adanya perbedaan golongan, kepentingan, sikap dan orientasi perjuangan merupakan asset sekaligus juga tantangan; betapa majemuknya kekuatan yang ada pada satu pihak, sedangkan pada pihak lain tak akan terelakkan lagi betapa rapuh (fragile) kebinekaan itu.

Satu upaya yang telah dicapai pada periode 1920-an adalah adanya keinginan kaum pergerakan untuk mewujudkan asas persatuan Indonesia. Atas inisiatif Studieclub yang ada di Bandung dan Surabaya pada bulan Desember 1926 didirikanlah Komite Persatuan Indonesia. Organisasi-organisasi yang masuk ke dalam komite ini adalah semua studieclub, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Jong Islamieten Bond, Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Akan tetapi, komite ini tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan semula (Pringgogidgo, 1980: 74).

Adalah Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 pimpinan Ir. Soekarno dan beberapa bekas anggota Perhimpunan Indonesia, berupaya mewujudkan impian Komite Persatuan Indonesia yang tidak pernah tercapai. Setelah bekerja sama dengan Dr. Sukiman (PSI) dalam membuat peraturan sementara, maka Ir. Soekarno (PNI) memprakarsai berdirinya Permusyawaratan Partij-partij Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tanggal 17 Desember 1927 (Noer, 1996: 271). Partai-partai yang terhimpun dalam permufakatan tersebut adalah PNI, PSI, BO, Pasundan, Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub, Sarekat Madura, Tirtajasa, dan Perserikatan Celebes.

Konsentrasi nasional PPPKI ini bertujuan sebagai berikut.

- (1) Menyamakan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi dengan bekerjasama antar anggotanya.
- (2) Menghindarkan perselisihan antar anggotanya.

Atas dasar itu, maka di dalam konsentrasi itu tidak akan diperbincangkan masalah asas dan faham-faham partai yang bergabung (Pringgogidgo, 1980: 74). Dengan demikian, melalui PPPKI ini

solidaritas antar organisasi yang menjadi tuntutan pokok dapat dilaksanakan (Kartodirdjo, 1990: 158).

Dalam anggaran dasar PPPKI juga disebutkan bahwa, rapat-rapat diadakan jika ada keperluan mendadak yang pelaksanaannya sekurang-kurangnya setahun sekali. Sedangkan badan yang tetap dari permufakatan ini adalah Majelis Pertimbangan yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil-wakil partai.

Kongres pertama PPPKI dilakukan pada tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1928 di Surabaya. Keputusan yang sangat penting dari kongres ini adalah mosi “dari rakyat kepada rakyat”, dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan pergerakan. Dalam mosi ini dijelaskan tentang hal-hal berikut.

- (1) Dalam melakukan propaganda untuk organisasi sendiri, anggota PPPKI tidak boleh menyalahkan asas-asas atau tujuan anggota yang lain.
- (2) Tidak boleh mempergunakan kata-kata yang sekiranya akan menyinggung perasaan orang lain.
- (3) Segala perselisihan antarsesama anggota PPPKI harus diselesaikan dengan jalan perundingan.

Pada tanggal 25 – 26 Desember 1928 di Bandung, PPPKI mengadakan rapat dengan mengambil keputusan sebagai berikut.

- (1) Akan menjalankan aksi yang kuat untuk menentang segala pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang merintangi orang-orang menyatakan pikirannya dengan merdeka dan merintangi aksi lain-lainnya.
- (2) Akan menuntut supaya para interniran yang tidak berdosa di Digul agar dibebaskan.
- (3) Akan membentuk suatu panitia untuk pengajaran (sekolah) kebangsaan.
- (4) Akan menyerahkan memorandum tentang peraturan *punale sanctie* terhadap kuli kontrak kepada Albert Thomas, ketua Konferensi Perburuhan Internasional, Genewa, bila ia datang ke Indonesia (Persatuan Indonesia, 1 – 7 – 1928).

Mosi-mosi di atas dilatarbelakangi oleh tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap para aktivis pergerakan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa, dalam peraturan tentang menjalankan hak berserikat dan berkumpul di Indonesia dijelaskan, antara lain, bahwa untuk mendirikan suatu perserikatan tidak usah mendapat ijin dari pemerintah. Dijelaskan pula mengenai perserikatan yang terlarang yaitu jika pendiriannya dirahasiakan dan jika yang berwajib menerangkan bahwa perserikatan itu berlawanan dengan keamanan umum.

Akan tetapi dalam kenyataannya, setiap perserikatan atau perkumpulan itu harus mendapat ijin terlebih dahulu. Di samping itu, penguasa dengan semena-mena menuduh seseorang atau badan yang dianggap melanggar pasal-pasal “karet” karena mengganggu *rust en orde* keamanan dan ketertiban. Hal ini sering terjadi terhadap seseorang yang dianggap anti pemerintah, sehingga dengan dalih apapun kasus pergerakan akan tetap dipersalahkan.

Pada konferensi di Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 29 – 30 maret 1929, PNI menganjurkan agar Perhimpunan Indonesia (PI) dijadikan pengawal terdepan di Eropa. Hal ini penting sekali karena hal-hal berikut.

- (1) Agar bangsa-bangsa di Eropa mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi di Indonesia.
- (2) Sebaliknya, agar PPPKI mengetahui kondisi politik di Eropa yang tentu ada kepentingannya dengan Indonesia.

Pada kongres di Solo, 25 - 27 Desember 1929, PPPKI kembali mengemukakan mosi "dari rakyat dan untuk rakyat", antara lain, sebagai berikut.

- (1) Membuat panitia penyelidikan pergerakan sekerja.
- (2) Buruknya penahanan lama-lama oleh posisi atas kaum politisi.
- (3) Tidak sahnya larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota partai nasional.
- (4) Setiap orang yang tidak menghormati persatuan Indonesia adalah musuh Indonesia.
- (5) Pembentukan Fonds Nasional untuk meningkatkan propaganda di dalam dan luar negeri.

Sementara itu, sehubungan dengan adanya penggeladahan terhadap para pimpinan PNI (29 Desember 1929), PPPKI memprotes penggeledahan itu (12 Januari 1930). Di samping itu, memperkuat dukungan terhadap fonds nasional untuk membantu keluarga yang sedang dalam tahanan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah mosi "dari rakyat untuk rakyat", dalam kondisi apapun pergerakan akan tetap ditingkatkan untuk meneruskan aksi menuju kemerdekaan. Bagi manapun pada masa itu terjadi pengawasan pemerintah yang berlebihan, baik terhadap perorangan maupun terhadap organisasi.

Seperti dikemukakan pada bagian yang lalu bahwa, benih-benih keretakan telah nampak ketika permufakatan ini mulai berdiri. Pertentangan pun tak dapat dielakkan lagi, sehingga pada bulan Desember 1930 PSI keluar dari PPPKI. Di samping itu, juga adanya perpecahan dalam Partindo dan PNI-Baru. Meskipun kedua organisasi ini berasal dari PNI (lama), akan tetapi ketika Ir. Soekarno dan kawan-kawan dipenjara, terjadilah dua kubu kekuatan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipersatukan kembali. Polarisasi ini lebih jelas lagi ketika Ir. Soekarno memilih partindo, sedangkan Drs. Moh. Hatta memilih PNI-Baru.

Namun demikian, PPPKI berupaya mempertahankan diri baik dari keretakan dalam federasi maupun karena reaksi dari penguasa. Untuk mewujudkan cita-citanya, PPPKI melakukan hal-hal berikut.

- (1) Mengganti nama permufakatan menjadi persatuan; kebangsaan menjadi kemerdekaan.
- (2) Memindahkan Majelis Pertimbangan dari Surabaya ke Jakarta.
- (3) Melakukan berbagai aksi untuk menentang kebijakan pemerintah dalam hal berserikat, hukum pidana, dan hak-hak luar biasa pemerintah atas persaingan.

Ketiga upaya di atas diharapkan akan memperkuat pergerakan, sehingga dengan demikian berbagai partai politik yang ada tidak dipaksa untuk mufakat, melainkan diusahakan cara-cara yang demokratis sesuai dengan latar belakang setiap parpol. Adapun pemindahan Majelis Pertimbangan ke Jakarta, mengingat bahwa Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan tempat berdirinya berbagai organisasi pergerakan. Sedangkan hal yang terakhir adalah upaya PPPKI dalam rangka membela para pemimpin pergerakan yang pada masa itu diasingkan, antara lain, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Sutan Sjahrir.

Sementara itu, pada paruh kedua dekade 1930-an karena reaksi dari pemerintah kolonial, PPPKI bisa mempertahankan aksinya lagi. Tambahan pula, upaya-upaya Ir. Soekarno untuk memperbaiki dan mendorong aksi-aksi PPPKI tidak bisa dilakukan lagi. Kondisi ini menyebabkan sikap pergerakan mencari format baru dalam mempersatukan partai-partai yang ada melalui Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

Pembentukan GAPI

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab yang lalu, kepasifan PPPKI menyebabkan tenggelamnya persatuan itu. Oleh karena itu, diperlukan wadah baru untuk merapatkan barisan dalam menentang penjajahan Belanda. Hal ini ditempuh karena beberapa sebab. Pertama, tidak adanya keputusan yang bersifat politik baik dari MIAI sebagai organisasi religius maupun Parindra dari non-religius (Kartodirdjo, 1990: 185). Kedua, “tersumbatnya” Volksraad dalam mengeluarkan aspirasi Bangsa Indonesia melalui kaum pergerakan. Mandegnya fraksi nasional dan ditolaknya Petisi Soetardjo merupakan contoh dari kegagalan ini. Ketiga, kegagalan Badan Perantara Partai-partai Politik Indonesia (BAPEPPI) dalam melaksanakan programnya. Keempat, melalui heterogenitas Indonesia dikumandangkan rencana Colign untuk membentuk negara-negara pulau sebagai reaksi dari politik *divide et impera*.

Selain faktor-faktor di atas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah situasi internasional pada saat itu. Hal ini pula yang melatarbelakangi inisiatif Husni Thamrin (Parindra) mengadakan rapat tanggal 19 Maret 1939 untuk mendirikan badan konsentrasi yang baru. Sebagai realisasi dari rapat di atas, maka pada tanggal 21 Mei 1939 diadakan rapat umum yang menghasilkan pembentukan konsentrasi nasional, Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

Sesuai dengan anggaran dasarnya tujuan GAPI adalah:

- 1) Menghimpun organisasi-organisasi politik bangsa Indonesia untuk bekerja sama.
- 2) Menyelenggarakan kongres Indonesia.

Pada bagian lain anggaran dasarnya disebutkan, bahwa Gabungan Politik Indonesia berdasarkan kepada beberapa hal berikut.

- 1) Hak untuk menentukan dan mengurus nasib dan bangsa sendiri.
- 2) Persatuan Nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik.
- 3) Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.

Meskipun persatuan nasional merupakan dasar aksi GAPI, akan tetapi dalam kenyataannya perpecahan dalam tubuh kaum pergerakan tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimanapun hal ini akan mempengaruhi bahkan menghambat pencapaian tujuan GAPI. Perpecahan tersebut terlihat ketika berdirinya Golongan Nasional Indonesia disamping adanya Fraksi Nasional. Di samping itu, di antara anggota-anggota pun terdapat perbedaan yang tidak bisa diselesaikan. Terdapatnya anggota-anggota GAPI, Parindra, PSII, PII, Pasundan dan Gerindo yang mempunyai konflik: PII Sukiman dengan PSII Abikusno; Gerindo dengan Moh. Yamin.

Sementara itu perpecahan kaum pergerakan tidak menjadi penghalang utama bagi GAPI untuk melakukan aksi-aksinya. Pada rapatnya tanggal 4 Juli 1939 GAPI memutuskan pendirian

Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Pembentukan kongres ini merupakan pelaksanaan program GAPI. Di samping itu GAPI melakukan aksi Indonesia Berparlemen. Dengan aksi ini diharapkan pemerintah Belanda memberi peluang untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat melalui Kongres Rakyat Indonesia. Tujuan ini dikemukakan berhubung dengan timbulnya Perang dunia II. Bertalian dengan hal di atas, GAPI juga menawarkan hubungan kerja sama Indonesia dengan Belanda, dengan harapan adanya perhatian Belanda terhadap aspirasi rakyat Indonesia. Hal ini untuk merealisasikan keputusan-keputusan konferensi GAPI yang dilangsungkan pada tanggal 19 dan 20 September 1939, antara lain sebagai berikut.

- 1) Perlunya dibentuk parlemen yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh rakyat, pemerintah harus bertanggung jawab kepada parlemen itu.
- 2) Jika keputusan No. 1) dipenuhi, maka GAPI akan memaklumkan kepada rakyat untuk mendukung Belanda.
- 3) Anggota-anggota GAPI akan bertindak semata-mata dalam ikatan GAPI (Pringgodigdo, 1980: 145).

Dalam berbagai konferensi dan resolusi, GAPI ternyata tetap mendesak pemerintah agar mengadakan parlemen sejati; bagaimanapun Volksraad yang ada tidak representatif bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, aksi-aksi GAPI "Indonesia Berparlemen" merupakan program yang terus-menerus dan disebarluaskan kepada semua partai baik anggota GAPI maupun anggota Kongres Rakyat Indonesia. Tambahan pula, bahwa GAPI sebagai badan pekerja KRI itu sudah menjadi kewajiban GAPI untuk mempropagandakannya oleh semua komite Indonesia Berparlemen di seluruh Indonesia.

Tuntutan GAPI, Indonesia Berparlemen, ternyata kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan status Kenegaraan Indonesia akan dibicarakan setelah selesai perang. Kondisi Belanda yang diduduki Jerman sejak bulan Mei 1940 ini tentu merupakan salah satu alasan bagi pemerintah Belanda. Ketika pemerintah Belanda menjadi *exile government* di London ini berarti semakin menjauhkan hubungan Indonesia dengan Belanda.

Akan tetapi, desakan yang terus-menerus dari GAPI "Indonesia Berparlemen" telah memaksa Belanda suatu panitia *Commissie tot bestudering van staatrechtelijke hervormingen* "(panitia untuk mempelajari perubahan-perubahan tata negara). Panitia yang biasa disebut *Commissie Visman* – nama ketuanya Visman – ini dibentuk pada bulan November 1940 dan laporannya ke luar tahun 1942 (Pringgodigdo, 1980: 196). *Commissie Visman* sendiri meminta keterangan dari GAPI untuk melakukan penjelasan mengenai Indonesia Berparlemen.

Melalui rapat pleno GAPI pada tanggal 31 Januari 1941, aksinya GAPI mengajukan memorandum yang isinya sebagai berikut:

A. Bentuk dan Susunan Parlemen.

1. Parlemen yang dicita-citakan oleh GAPI terdiri dari dua majelis, majelis pertama (*eerste kamer*) dan majelis kedua (*tweede kamer*).
2. Hak anggota kedua majelis diberikan pada penduduk negara (*staatsburger*) baik laki-laki maupun perempuan.
3. Semua anggota dipilih:

- a. Rapat majelis pertama, menurut aturan yang akan ditentukan, aturan mana yang harus memberi tanggungan, supaya golongan-golongan atau aliran-aliran (*groepelingen en stromingen*) dalam masyarakat mendapat perwakilan yang pantas dan adil.
 - b. Buat majelis kedua oleh rakyat (*staatsburger*).
4. Penduduk Negara terdiri pada dasarnya diira "*Netherlandsh Onderlaan*" yang sekarang.
 5. Pemilihan dari anggota majelis kedua dilakukan atas dasar berimbangan (*evenredigheid*) dan pembagian dalam daerah-daerah (regional).
 6. Hak memilih adalah umum dan langsung.
 7. Hak memilih pada azasnya diberikan kepada tiap-tiap penduduk Negara.
 8. Jumlah anggota majelis pertama dan majelis kedua adalah masing-masing sedikitnya 100 dan 200.
 9. Parlemen adalah kekuasaan Pembikin Hukum yang tertinggi.
 10. Parlemen menentukan semua peraturan yang mengenai kepentingan negara.
- B. Bentuk Indonesia Berparlemen.
1. Indonesia adalah suatu negara dikepalai oleh seorang Kepala Negara (*staatschoofd*).
 2. Kepala Negara mempunyai hak veto (meminta dan menolak usulan parlemen), dan tidak memberi pertanggungan kepada parlemen (*ouschenbaar*).
 3. Menteri-menteri menanggung jawab.
 4. Kekuasaan buat menjalankan pemerintah adalah pada Kepala Negara.
 5. Kepala Negara mengangkat dan melepas menteri-menteri sesudah bermusyawarah dengan parlemen.
 6. Kepala Negara dibantu oleh satu badan penasehat *Raad Van Staat* yang anggotanya diangkat dan dilepas oleh Kepala Negara.
 7. Indonesia dan Nederland menjadi satu serikat negara (*statenbond*).
- C. Daya upaya untuk menciptakan Indonesia Berparlemen.
1. Harus diadakan perubahan-perubahan tata negara dalam arti kemajuan dalam susunan tata negara.
 2. Langkah-langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah luhur (*Oppersbestuur*) c.q. Pemerintah Hindia Belanda (*Indische Regering*).
 - a. Mengangkat seorang Gubernur Jenderal bangsa Indonesia.
 - b. Mengangkat seorang onserdirektur bangsa Indonesia buat tiap-tiap departemen c.q. menambah tenaga Indonesia dalam pimpinan departemen-departemen.
 - c. Mengangkat lebih banyak bangsa Indonesia di dalam Raad Van Indie.
 - d. Mengangkat Majelis Rakyat (*volkskamer*) di samping volksraad yang sekarang.
 - e. Melakukan pemilihan-pemilihan buat anggota-anggota Majelis Rakyat, menurut aturan pemilihan umum dan langsung atas dasar pertimbangan (*evendigheid*) dan pembagian dalam daerah-daerah (regional).
 - f. Memberikan hak dua memilih dan buat dipilih buat penduduk negara, Rakyat Kerajaan Belanda (*Nederlandsch Orderdaan*) laki-laki dan perempuan.
 - g. Menentukan wakil-wakil pemilih baik laki-laki maupun perempuan (*Kiesmanen en Kiesvrouwen*) buat yang tidak pandai membaca dan menulis salah satu tulisan di Indonesia.
 3. Volksraad dan Majelis Rakyat bersama-sama menjadi perwakilan rakyat.

4. Pemerintah dan Perwakilan Rakyat bersama-sama menjadi “Pemerintah Berdiri Sendiri” (*Self Government*).
5. Pemerintah berdiri sendiri mengatur kepentingan negara (*Begrooting*, dll).
6. Pemerintah luhur (*Opperbestuur*) dan pemerintah bersiri sendiri (*Self Government*) bersama-sama menentukan:
 - a. Hukum Dasar Negara (*constitutie*) yang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak saja susunan tata negara, tetapi susunan sosial ekonomi dan masyarakat juga diatur menurut atas kerakyatan (*Demokrasi*).
 - b. Perhubungan dengan negara-negara lain.
 - c. Peraturan-peraturan kepentingan pertahanan (*pembelaan*) negara.
7. Susunan tata negara yang menciptakan Indonesia Berparlemen hendaklah tercapai dalam 5 tahun, jika perlu menggunakan *staatsnoodrecht* (*Penjedar*, no. 9, 27 Februari 1941; EYD dari penulis).

Memorandum yang diajukan GAPI itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengurus sendiri bangsa dan negaranya. Hal ini juga sekaligus menghapus ketidakpercayaan pemerintah kolonial yang selalu menganggap bangsa Indonesia masih mentah dan belum bisa menyelenggarakan pemerintah sendiri.

Sebagaimana dijelaskan pada butir C.2.d bahwa pemerintah Hindia Belanda akan mengadakan Majelis Rakyat. Meskipun aksi GAPI ditolak, akan tetapi Majelis Rakyat Indonesia terbentuk sebagai pengganti Kongres Rakyat Indonesia (13 – 14 September 1941). Pembentukan MRI itu juga tidak lepas dari tujuan GAPI semula: mencapai kesentosaan dan kemuliaan rakyat yang berdasarkan demokrasi. Tambahan pula, MRI ini dianggap sebagai suatu badan perwakilan rakyat Indonesia, dimana di dalamnya terdapat GAPI, MIAI, dan PVPN.

Jika dilihat anggota-anggotanya MRI ini dapat dikatakan sebagai konsentrasi nasional. Apalagi ia merupakan badan yang meliputi seluruh pergerakan rakyat. Akan tetapi, unsur dari GAPI mempunyai pengaruh terbesar dalam MRI. Agar terlihat aktivitas dan orientasi konsentrasi nasional PPPKI dan GAPI. Di bawah ini akan dijelaskan perbandingan keduanya.

Perbandingan Aktivitas dan Orientasi PPPKI dan GAPI

Jika membandingkan antara PPPKI dan GAPI ini tentu akan terdapat persamaan dan perbedaan keduanya. Bagaimanapun keduanya merupakan konsentrasi nasional yang berperan dalam mempersatukan arah pergerakan melawan kebijakan pemerintah kolonial. Namun demikian, dari kedua badan tersebut tidak bisa digeneralisasikan karena baik organisasi maupun periodenya mempunyai karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, kedua konsentrasi nasional ini secara umum akan terlihat keunikannya dari aktivitas dan orientasi keduanya.

Aktivitas PPPKI sejak pembentukannya dipilah oleh kondisi pergerakan yang mendapat tekanan berat dari pemerintah kolonial. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab yang lalu, bahwa sikap Gubernur Jenderal sangat mempengaruhi gelombang pergerakan nasional. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya adalah situasi pergerakan nasional sendiri yang bisa memaksa Gubernur Jenderal menjadi reaksioner.

Ketika PPPKI terbentuk (17 Desember 1927) GJ de Graeff memperbolehkan kaum pergerakan asal jangan komunis. Akan tetapi PNI yang merupakan pelopor utama dalam pembentukan PPPKI ini mendapat perlakuan yang sama terhadap PKI. Penggeledahan dan kemudian penangkapan terhadap pimpinan PNI, Ir. Soekarno cs, sudah pasti mempengaruhi aktivitas PPPKI.

Selain dari yang disebut di atas, faktor yang menentukan aktivitas dan orientasi PPPKI adalah perpecahan anggota-anggotanya. Hal ini juga terjadi terhadap GAPI. Keretakan dalam badan tersebut merupakan salah satu penghambat aktivitasnya. Oleh karena itu, dari kedua konsentrasi nasional itu tujuannya sama yaitu menyamakan arah aksi yang pada gilirannya akan kekuatan. Sedangkan dasarnya adalah persatuan dari semua anggotanya.

Hal lain yang sangat mempengaruhi aktivitas dan orientasi PPPKI dan GAPI adalah kondisi internasional yang melatarbelakanginya. Pada masa PPPKI dunia internasional dipengaruhi oleh depresi ekonomi, malaise. Juga kebijakan pemerintah terhadap perjuangan PPPKI itu berupaya untuk menekan suara-suara yang menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terutama yang dilakukan oleh anggota PPPKI yang non kooperatif. Kasus terhadap para pemimpin PNI misalnya, merupakan contoh dari peristiwa yang terjadi pada PPPKI.

Lain halnya dengan PPPKI yang diterangkan di atas, pada masa GAPI aktivitasnya berada dalam bayang-bayang Perang Dunia II. Sehingga aktivitas GAPI juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi internasional. Sebagai contoh adalah aksi Indonesia Berparlemen dikaitkan dengan Perang Dunia II: jika di Indonesia dibentuk parlemen, maka GAPI akan menyerukan kepada seluruh rakyat agar mendukung Belanda berpendirian bahwa segala sesuatu tuntutan dari GAPI "Indonesia Berparlemen" akan dibicarakan setelah perang selesai. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan dukungan dari rakyat Indonesia.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan kedua konsentrasi tersebut membawa konsekuensi kepada keduanya untuk membawa arah atau orientasi organisasinya. Hal ini berhubungan dengan konsolidasi dalam konsentrasi karena memang adanya perpecahan di dalamnya. Baik PPPKI maupun GAPI selalu mengarahkan gerakannya pada persatuan dan kesatuan aksi. Juga setiap aktivitas yang dilakukan keduanya tidak menyinggung perasaan yang satu dengan yang lainnya.

Orientasi yang lain adalah mengenai non kooperatif dan kooperatif dari keduanya. Hal ini tidak lepas dari organisasi yang dominan dari keduanya. Jika PPPKI dipelopori dan juga didominasi oleh PNI yang non kooperatif, maka pada aksinya terlihat revolusioner. Sedangkan pada GAPI yang memeloporinya adalah Parindra yang kooperatif sehingga orientasi politiknya lebih moderat walaupun sama-sama perannya. Akan tetapi dari sedikit perbandingan yang antara lain dikemukakan di atas, sudah tentu dapat di tarik suatu benang merah mengenai pergerakan yang dilakukan melalui konsentrasi nasional: PPPKI dan GAPI.

Penutup

Selama dekade 1920-an dan dekade 1930-an, pergerakan nasional diliputi oleh kondisi internasional pasca PD I dan pra PD II. Kondisi tersebut membawa pemerintah kolonial Belanda kepada tekanan-tekanan yang dirasakan koloni-koloninya, termasuk Hindia Belanda. Dengan berbagai alasan, pemerintah kolonial melalui GJ-nya bertindak reaksioner terhadap pergerakan nasional.

Dalam situasi demikian itu, kaum pergerakan mencoba membuat suatu terobosan untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan melalui pembentukan konsentrasi nasional: PPPKI dan GAPI. Pembentukan keduanya, sebenarnya, diliputi oleh konflik antar anggota yang tentu saja dapat melemahkan kedua federasi itu. Namun demikian, ternyata tidak melemahkan tujuan semula dalam rangka menyamakan arah aksi bersatu melawan pemerintah kolonial. Hal ini pula yang oleh Prof. Heliuss Samsuddin disebut sebagai tarik ulur daya sentripetal dan sentrifugal yang kemudian bermuara pada integrasi nasional: kemerdekaan Indonesia.

Di samping itu, kondisi tarik ulur sebagaimana yang terjadi pada PPPKI dan GAPI itu juga dapat dijadikan ajang reflektif bagi kondisi bangsa Indonesia masa kini. Walaupun terjadi berbagai kepentingan yang senantiasa tarik menarik, akhirnya para elite politik harus kembali menyadari, bahwa konflik dalam proses berdemokrasi adalah wajar. Akan tetapi yang menjadi tujuan utama adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wallahu'alam.

Daftar Pustaka

- Dimjati, M. (1951). *Sedjarah Perdjuangan Indonesia*. Djakarta: Widjaja.
- Duijs, J.E.W. (1985). *Membela Mahasiswa Indonesia di Depan Pengadilan Belanda*. Terj. K.L.M. tobing. Jakarta: Gunung Agung.
- Frederick, W.H. dan Soeri Soeroto. (1991). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Hatta, M. (1981). *Memoirs*, Penders, C.L.M. (ed.). Singapore: Gunung Agung.
- Koch, D.M.G. (1951). *Menuju Kemerdekaan*. Terj. Abdoel Moeis. Djakarta: Pembangunan.
- Noer, D. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900 – 1942*. Jakarta: LP3ES.
- Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (1981). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sjahrir, S. (1947). *Fikiran dan Perdjuangan*. Djakarta: Dian Rakjat.
- Sjamsuddin, H. (1994). "Pola Tarik Ulur Daya Sentripetal dan Daya Sentrifugal Dalam Sejarah Indonesia". Makalah. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung.
- Slametmuljana. (1968). *Nasionalisme Sebagai Modal Perdjuangan Bangsa Indonesia*. Djakarta: Balai Pustaka.

Surat Kabar/Majalah:

Penjedar, no.9, 27 Februari 1941

Sinar Padoendan, 26 Mei 1939

Tjahya Timoer, 22 Mei 1939